

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PADI SALIBU DI KABUPATEN TANAH DATAR

Novira Rahmayuni<sup>1</sup>, Hendri Koeswara<sup>2</sup>, Roni Ekha Putera<sup>3\*</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang  
roniekhaputera@soc.unand.ac.id\*

### Abstract

*This study aims to describe how the implementation of the Salibu Rice Cultivation Technology Development Program in Tanah Datar Regency. This research was motivated by a decrease in the area of rice harvested in West Sumatra in 2020. Tanah Datar Regency is the second largest district that experienced a decline in harvested area. In Tanah Datar Regency there is a program that aims to achieve food security known as the Salibu Rice Technology Development Program. This program can be one of the solutions related to the decline in harvested area that occurred in Tanah Datar Regency. But unfortunately the implementation of this program has not been implemented optimally. The theory used in this study is the implementation theory by Van Meter and Van Horn. The result of the research is that the implementation of the Salibu Rice Technology Development Program has been implemented but is not yet optimal. This is caused by several things, namely the absence of regulations at the level of a regent's regulation that regulates the implementation of this program, the lack of human resources in terms of quantity and non-human resources in terms of the budget, as well as an unsupportive sosial and economic environment.*

**Keywords:** Implementation, Salibu Rice Technology Development Program, Tanah Datar Regency

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan luas panen padi di Sumatra Barat pada Tahun 2020 yang lalu. Kabupaten Tanah Datar menjadi kabupaten nomor dua terbesar yang mengalami penurunan luas panen. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dikenal dengan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu. Program ini dapat menjadi salah satu solusi terkait penurunan luas panen yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar. Namun sayangnya pelaksanaan program ini belum terlaksana secara maksimal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan pengimplementasian Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu sudah terlaksana namun belum cukup optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih belum adanya regulasi setingkat peraturan bupati yang mengatur pelaksanaan program ini, kurangnya sumber daya manusia dari segi kuantitas dan sumber daya non-manusia dari segi anggaran, serta lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu, Kabupaten Tanah Datar

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Agraris, yaitu negara yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor penopang dalam pembangunan. Pembangunan dalam bidang pertanian dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Namun munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Tahun 2019 yang lalu menjadi suatu tantangan dan permasalahan baru diseluruh lini kehidupan.

Salah satu dampak yang perlu diantisipasi dari mewabahnya penyebaran Covid-19 di Indonesia adalah menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan Ketahanan Pangan (GKP) yang diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian ditengah ancaman virus corona merupakan salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat dan harus didukung oleh semua pihak, khususnya oleh para petani dan penyuluh sebagai ujung tombak dan penggerak sektor pertanian [1].

Sumatra Barat merupakan salah satu provinsi yang mendukung perwujudan dari gerakan ketahanan pangan. Provinsi Sumatra Barat juga termasuk salah satu dari 10 provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Ada beberapa kabupaten yang menjadi sentra produksi padi di Sumatra Barat, salah satunya adalah Kabupaten Tanah Datar [2]. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus ke Kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu kabupaten sentra penghasil padi. Peneliti ingin melihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan sendiri Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dibidang pangan memiliki sebuah program yang disebut dengan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu. Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu merupakan salah satu program dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang mampu mewujudkan ketahanan pangan serta menjadi solusi dari

permasalahan penurunan luas panen di Kabupaten Tanah Datar. Pada Tahun 2020 yang lalu Kabupaten Tanah Datar tercatat sebagai salah satu dari tiga kabupaten yang mengalami penurunan luas panen terbesar di Sumatra Barat. Kabupaten Tanah Datar menjadi kabupaten nomor 2 (dua) terbesar setelah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengalami penurunan luas panen. Berikut ini tabel penurunan luas panen di Sumatera Barat:

**Tabel 1. Perbandingan Luas Panen Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (hektare), 2019-2020**

| No | Nama Kabupaten     | Tahun Perbandingan |           |
|----|--------------------|--------------------|-----------|
|    |                    | 2019               | 2020      |
| 1  | Pesisir Selatan    | 39.205,89          | 30.047,03 |
| 2  | Tanah Datar        | 34.615,67          | 32.729,08 |
| 3  | Pasaman            | 34.261,39          | 33.192,22 |
| 4  | Solok              | 34.116,65          | 33.518,09 |
| 5  | Agama              | 32.622,02          | 32.764,16 |
| 6  | Lima Puluh Kota    | 32.612,23          | 30.790,65 |
| 7  | Padang Pariamanfng | 32.362,44          | 30.830,54 |
| 8  | Sijunjung          | 14.795,81          | 16.080,07 |
| 9  | Solok Selatan      | 14.725,29          | 13.646,53 |
| 10 | Padang             | 12.541,95          | 10.656,64 |
| 11 | Pasaman Barat      | 9.309,02           | 9.755,90  |
| 12 | Dharmasraya        | 7.112,57           | 8.313,09  |
| 13 | Payakumbuh         | 4.379,57           | 4.790,55  |
| 14 | Pariaman           | 2.726,48           | 2.874,08  |
| 15 | Kota Solok         | 2.386,48           | 2.718,52  |
| 16 | Sawahlunto         | 1.440,49           | 1.299,87  |
| 17 | Kep.Mentawai       | 829,32             | 208,12    |
| 18 | Padang Panjang     | 822,81             | 809,38    |
| 19 | Bukittingi         | 805,15             | 619,95    |

Sumber: BPS Sumatera Barat Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada Tahun 2019 yang lalu luas panen di Kabupaten Tanah Datar adalah 34.615,67 hektare kemudian terjadi penurunan di tahun 2020 sehingga luas panen di Kabupaten Tanah Datar menjadi 32.729,08 hektare. Besarnya penurunan yang terjadi dari tahun 2019-2020 adalah 1.886,59 hektare.

Kemudian pada Tahun 2021 yang lalu merujuk pada data produksi padi Tahun 2021 menunjukkan terjadinya penurunan hasil produksi padi Tahun 2021, dimana terjadi penurunan hasil produksi padi dari triwulan I sampai dengan triwulan III. Hasil produksi padi di triwulan I adalah 82.832,97 ton, kemudian pada triwulan II terjadi penurunan dimana hasil produksi padi adalah sebesar 72.704,07 ton dan kemudian di triwulan III kembali terjadi penurunan yang mana hasil produksi padinya hanya 71.183,88 ton. Solusi untuk meningkatkan produksi padi itu dapat dilakukan dengan cara penambahan areal dengan melakukan cetak sawah baru dan kedua dengan meningkatkan indeks pertanamannya. Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar sendiri untuk melakukan cetak sawah baru guna menambah luas tanaman padi untuk menaikkan hasil produksi padi itu sudah tidak memungkinkan lagi karena terbatasnya lahan di Kabupaten Tanah Datar.

Dengan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan di atas dikarenakan banyaknya manfaat serta keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan program ini. Program pengembangan teknologi padi salibu ini dapat menjadi salah satu solusi untuk peningkatan hasil produksi tanpa perlu melakukan cetak sawah baru, karena di Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan cetak sawah baru lagi itu sudah tidak mungkin.

Namun dalam proses pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu ini terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusianya. Sulitnya merubah kebiasaan petani untuk tertib salibu, adanya tradisi-tradisi masyarakat yang berkembang sehingga menjadi salah-satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu. Serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang juga ikut menjadikan pelaksanaan program ini terhambat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Maksud dari ilmiah disini adalah perolehan data penelitian dilakukan dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Data tersebut diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Pertanian di Kabupaten Tanah Datar sebagai fokus penelitian secara lebih luas dan dalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Penggunaan teknik wawancara bertujuan untuk mengetahui secara detail dan mendalam terkait topik penelitian [4]. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan pedoman wawancara tetapi juga melakukan penggalan lebih dalam untuk informasi yang membutuhkan keterangan lebih dalam.

Selanjutnya teknik observasi yang bertujuan untuk membandingkan apa yang peneliti ketahui melalui proses wawancara dengan kenyataan yang terjadi. Untuk observasi disini peneliti langsung mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan ikut terlibat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu melalui kegiatan *internship*. Selain itu juga, peneliti juga melakukan observasi langsung ke Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Kecamatan Pariangan dan Kecamatan Tanjung Emas. Kegiatan observasi yang peneliti lakukan berupa mengamati dan menganalisis secara langsung lingkungan di Dinas Pertanian serta BPP kecamatan. Peneliti juga mengamati nilai, norma dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan Dinas Pertanian

Kabupaten Tanah Datar serta BPP kecamatan.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana disini peneliti terlebih dahulu menetapkan kriteria informan guna menyaring informan kunci. Sedangkan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah dalam bentuk lembaga, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahapan reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data mentah yang muncul dari penelitian Implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar.
2. Tahapan penyajian data, merupakan tahapan dimana peneliti menyusun informasi dari data-data yang telah diperoleh yang mana dalam hal ini segala informasi dan data yang berkaitan dengan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar, sehingga akan terbentuk suatu pernyataan dalam bentuk teks.
3. Tahapan Kesimpulan, merupakan tahapan akhir dari analisis data yang berupa penarikan kesimpulan yang dalam hal ini adalah penarikan kesimpulan terhadap penelitian terkait implemmentasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar.

Terakhir teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini akan mengidentifikasi serta mengukur implementasi dari Program Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Salibu menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ini memiliki 6 (enam) variabel yang terdiri atas ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi) agen pelaksana, dan terakhir ada kondisi sosial, ekonomi dan politik. Setiap variabel tersebut juga memiliki beberapa indikator yang akan dijabarkan sebagai berikut ini:

#### I. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan, pemahaman implementor terhadap ukuran dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan sangatlah penting karena hal ini akan berpengaruh terhadap implementasikan kebijakan tersebut. Pada penelitian ini, Implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar dalam melihat ukuran dan tujuan kebijakan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu dikaji dengan dua indikator, yaitu:

##### a) Jelas dan Terukur

Tujuan dan ukuran kebijakan yang di implementasikan haruslah jelas dan terukur agar dapat diwujudkan. Implementor yang pada dasarnya merupakan pihak-pihak yang mengeksekusi kebijakan, maka dari itu para implementor harus memahami dengan jelas ukuran dan tujuan spesifik yang diinginkan dari kebijakan yang akan diimplementasikan, serta perlu mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakan yang dijalankan tersebut [7]. Adapun yang menjadi sasaran dan tujuan dalam Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan melalui peningkatan produksi per Masa Tanam (MT) dan

peningkatan Indeks Panen (IP) per tahun.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa para implementor pelaksana dari program ini telah memiliki pandangan yang sama terkait tujuan dari program ini, dan mereka mengerti dan paham tujuan dan sasaran dari program ini. Implementor mengetahui secara jelas kondisi seperti apa yang diharapkan muncul dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar. Serta untuk dasar kebijakan atau regulasi yang membahas secara khusus terkait pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini belum ada baik itu dalam bentuk perda maupun perbup. Program ini dalam pelaksanaannya masih berlandaskan pada SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang selalu diperbaharui setiap tahunnya. Dan untuk pelaksanaan program ini sudah tertera dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

#### b) Keadilan

Keadilan disini maksudnya adalah keadaan dimana sebuah kebijakan yang dibuat haruslah memperhatikan berbagai keinginan serta aspirasi dari masyarakat agar ketika pelaksanaannya berlangsung tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Sebuah kebijakan haruslah mampu mengakomodir kepentingan semua lini implementor.

Menurut Van Meter dan Van Horn indikator keadilan ini akan terwujud jika semua pihak pelaksana yang terlibat dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan menggunakan aturan yang sama mencakup berbagai keinginan dan aspirasi [8]. Dalam penelitian implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini sudah adanya keadilan dimana Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar telah memberikan prinsip keadilan pada setiap petani pelaksana salibu dimana mereka yang terdaftar sebagai pelaksana sekolah lapang (SL) salibu, maka mereka akan mendapatkan bantuan berupa pupuk, ATK dan biaya transportasi serta biaya makan minum selama kegiatan SL berlangsung. Namun untuk keadilan bagi para pelaksana program yang mana disini adalah penyuluh

kegiatan dirasa masih kurang. Hal ini dikarenakan adanya penyuluh yang merasa kurang adil terhadap fasilitas uang minyak atau uang transport yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Besaran uang minyak atau uang transport yang diberikan kepada setiap penyuluh itu sama, namun disini ada beberapa penyuluh yang mengampuh dua nagari binaan di lapangan.

## II. Sumber Daya

Keberhasilan proses pengimplementasian suatu kebijakan sangatlah bergantung pada kemampuan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu juga sangat perlu diperhatikan. Begitu juga dalam penelitian terkait implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini yang juga membutuhkan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.

#### a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menurut Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu indikator yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan atau program. Indikator sumber daya manusia ini memiliki cakupan berupa kualitas dan kuantitas. Kualitas ini merupakan kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh para implementor, sedangkan kuantitas ini berupa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi kebijakan atau program. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dari segi kualitas para implementor dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar sudah terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman dan kompeten dalam bidang pertanian dan mereka sudah mengerti dengan tupoksi kerja mereka masing-masing serta dari segi latar belakang pendidikan pun rata-rata mereka merupakan tamatan dari jurusan yang memiliki kaitan dengan bidang pertanian.

Sedangkan dari segi kuantitasnya baik itu BPP Kecamatan Pariangan maupun BPP Kecamatan Tanjung Emas untuk jumlah sumber daya manusianya masih kurang.

Diketahui bahwa jumlah sumber daya penyuluh yang ada di Kecamatan Pariangan menurut koordinator BPP Kecamatan Pariangan dirasa masih kurang. Terlihat dari jumlah nagari yang ada di Kecamatan Pariangan ini adalah 6 (enam) nagari sedangkan jumlah penyuluh nagari yang ada di BPP ini hanya berjumlah 5 (lima) orang yang menyebabkan adanya penyuluh yang merangkap 2 (dua) wilayah kerja.

Kekurangan sumber daya pelaksana juga dirasakan oleh BPP Kecamatan Tanjung Emas, dimana kecamatan Tanjung Emas sendiri memiliki 4 (empat) wilayah nagari dan jumlah penyuluh yang ada di BPP Kecamatan Tanjung Emas juga ada 4 (empat) orang sedangkan luas sawahnya 1429 hektare. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa BPP Kecamatan Tanjung Emas membutuhkan 3 (tiga) orang penyuluh lagi. Pagaruyung sebaiknya ditambah 1 (satu) orang, Saruaso 1 (satu) orang lagi, Tanjung Barulak 1 (satu) orang penyuluh lagi. Berikut ini tabel terkait aktor pelaksana Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu:

**Tabel 2. Daftar Nama Pegawai Pelaksana Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu**

| No | Nama                 | Pendidikan         |                     | Jabatan                   |
|----|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
|    |                      | Tingkat Pendidikan | Jurusan             |                           |
| 1  | Wel Embra, SP        | S1                 | Pertanian           | Kabid Tanaman Pangan      |
| 2  | Rumasyah, SP         | S1                 | Faper ta            | Penyuluh Pertanian Madya  |
| 3  | Revi Dasrianti, S.TP | S1                 | Teknologi Pertanian | THL                       |
| 4  | Yenni Marlis, S.Pt   | S1                 | Peter nakan         | Koordinator BPP Pariangan |
| 5  | Harifon              | SMA                | -                   | PPL Nagari Pariangan      |
| 6  | Hendra               | SMT                | -                   | PPL                       |

|    |                         |             |                          |                                  |
|----|-------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
|    | Atmen                   | P           |                          | Nagari Simabur, Nagari Batu Basa |
| 7  | Widya Erja Syafitri, SP | S1          | Agrot eknologi Pertanian | PPL Nagari Tabek                 |
| 8  | Hendria Herlina, SP     | S1          | Pertanian                | PPL Nagari Sungai Jambu          |
| 9  | Primatra Arinal, S.Pt   | SPP SNA KMA | -                        | Koordinator BPP Tanjung Emas     |
| 10 | Dita Krisna Putri, S.P  | S1          | Pemu liaan Tana man      | PPL Koto Tangah                  |
| 11 | Dona Nofila             | STM P       | -                        | PPL Tanjung Barulak              |
| 12 | Devi Yulisa, SP         | S1          | Pertanian                | PPL Pagaruyung                   |

Sumber: Data Pegawai Dinas Pertanian, 2022

**b) Sumber Daya Non-Manusia**

Selain sumber daya manusia, terdapat juga sumber daya non-manusia yang terdiri atas sumber daya finansial, waktu serta sarana dan prasarana. Dalam menjalankan implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar, pemerintah memberikan dukungan finansial. Sumber finansial untuk pelaksanaan program ini berasal dari APBD Kabupaten Tanah Datar. Namun anggaran pelaksanaan program pada Tahun 2020 mengalami pemotongan dikarenakan adanya covid-19. Berikut ini tabel anggaran pelaksanaan program sebelum dan sesudah covid-19.

**Tabel 3. Anggaran Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu Tahun 2019-2021**

| Tahun | Anggaran           |
|-------|--------------------|
| 2019  | Rp. 304.220.000,00 |
| 2020  | Rp. 185.443.000,00 |
| 2021  | Rp. 351.933.100,00 |

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Tanah Datar, 2020

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran untuk pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020, kemudian di Tahun 2021 sudah kembali normal kembali untuk anggaran pelaksanaan program ini.

Selain sumber daya finansial, untuk menunjang kelancaran Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Tanpa adanya sarana prasarana pendukung, tentu program ini tidak akan berjalan lancar. terkait sarana prasarana yang diberikan dinas kepada petani untuk menunjang pengembangan salibu itu ada pemberian pupuk, mesin potong rumput, pupuk organik, obat-obatan, bibit untuk tanam pertama serta ditunjang dengan uang transportasi dan uang makan minum ketika pelaksanaan sekolah lapang (SL) salibu. Namun bantuan ini sering tidak tepat waktu pembagiannya.

### III. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik agen pelaksana ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya struktur organisasi, norma-norma yang terdapat dalam organisasi serta pola hubungan yang terjadi antar aktor pelaksana [9]. Aktor pelaksana dalam Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

#### a) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga pelaksana kebijakan dan memiliki pengaruh terhadap bagaimana kebijakan dijalankan. Hal ini dikarenakan jika organisasi pelaksana memiliki struktur organisasi yang kompleks atau rentang kendalinya terlalu panjang, maka akan menghambat para pelaksana kebijakan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi begitu juga sebaliknya.

Untuk struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang terlibat dalam pelaksanaan Program

Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar jelas dan tidak kompleks. Struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu adalah bidang tanaman pangan sebagai penanggung jawab program dan dibantu kelompok jabatan fungsional dinas yang mana disini adalah penyuluh fungsional yang ada di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan.

#### b) Norma-Norma

Norma-norma agen pelaksana merupakan cakupan dari nilai-nilai serta aturan yang terdapat dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi kinerja instansi yang bersangkutan. Dampak dari adanya norma-norma yang diterapkan di dalam organisasi ini akan secara langsung mempengaruhi bentuk perilaku pada sumber daya manusia yang bekerja di organisasi tersebut.

Dalam implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Tanah Datar yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, juga memiliki norma-norma yang berlaku di dalamnya. Norma-norma yang berlaku ini merupakan norma yang mengacu pada aturan umum yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian serta Kepala Bidang Tanaman Pangan, mereka mengatakan tidak ada aturan khusus, aturan yang digunakan merupakan aturan yang berlaku sama dengan instansi dinas lainnya yaitu aturan terkait kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Begitu juga untuk norma atau aturan yang berlaku di BPP itu tidak ada aturan khusus dan hanya menyesuaikan saja dikarenakan banyak agenda kegiatan penyuluh itu di lapangan.

#### c) Pola-Pola Hubungan yang Terjadi dalam Birokrasi

Bentuk pola hubungan yang terjadi baik itu yang ada di internal maupun eksternal organisasi sangat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kebijakan. Pola hubungan ini dapat dilihat melalui proses komunikasi dan informasi yang

terjadi dalam agen pelaksana dan pelaksana kebijakan publik.

Untuk pola hubungan yang terjalin di Dinas Pertanian baik itu dilingkungan internal maupun eksternal itu sudah baik. Hal ini dikarenakan proses komunikasi dan koordinasi sudah terlaksana dengan baik. Ketika melaksanakan suatu program atau kegiatan tentu terjadi komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena setiap pelaksana yang terlibat itu memiliki tanggung jawab masing-masing, punya tugasnya masing-masing dan perlu adanya koordinasi dan komunikasi agar tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dalam pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu ini pola hubungannya tidak kompleks karena hanya melibatkan bidang tanaman pangan serta BPP kecamatan.

#### **IV. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Van Meter dan Van Horn mengakui bahwa dalam proses implementasi kebijakan publik proses komunikasi dan koordinasi di dalam dan antar organisasi memang merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Proses komunikasi dan koordinasi ini sangatlah mempengaruhi proses dari implementasi kebijakan itu sendiri, karena jika komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan semakin baik, maka kemungkinan untuk terjadi kesalahan semakin kecil serta dapat meningkatkan prospek tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

##### **a) Komunikasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn proses komunikasi merupakan suatu proses yang sulit dan kompleks baik itu dilakukan di dalam suatu organisasi maupun antar organisasi. Dalam penelitian tentang Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar, komunikasi internal di dalam Dinas Pertanian yang merupakan pelaksana kebijakan haruslah terjalin dengan baik karena hal tersebut sangat menentukan

tercapainya tujuan dari implementasi program budidaya padi salibu itu sendiri.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu ini tidak memiliki kendala karena sarana untuk melakukan komunikasi itu beragam mulai dari menyampaikan agenda serta progres kegiatan melalui kegiatan apel pagi yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis, penyampaian informasi melalui kegiatan rapat, bisa penyampaian langsung kepada pihak terkait maupun penyampaian informasi dilakukan melalui via telfon atau WhatsApp. Kemudian juga karena di dinas sistemnya berjenjang tentu apapun itu harus di laporkan kepada kepala dinas. Dalam hal ini sudah dapat dilihat bahwa komunikasi vertikal atau komunikasi antara atasan dengan bawahan itu sudah terlaksana dengan baik.

Komunikasi yang terjalin baik itu komunikasi di dalam Dinas Pertanian maupun dengan BPP juga sudah terlaksana dengan baik dan hampir tidak ditemui masalah komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selanjutnya proses komunikasi eksternal antara dinas dengan kelompok sasaran yaitu kelompok tani juga tidak memiliki kendala. Komunikasi ini bisa melalui kegiatan penyusunan programa penyuluhan dengan setiap ketua kelompok tani dan juga melalui kegiatan sekolah lapang.

##### **b) Koordinasi**

Dalam penelitian implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar ini, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan. Balai Penyuluh Pertanian kecamatan ini merupakan sebuah tempat berkumpulnya para penyuluh untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

Bentuk koordinasi antara dinas dengan BPP dapat dilihat dari pelaksanaan sekola



lapang (SL) padi salibu, koordinasi terkait bantuan SL padi salibu yang akan dilaksanakan dan hal ini dikoordinasikan dengan bidang tanaman pangan sebagai penanggung jawab program ini, kemudian juga dilihat dari koordinasi antara penyuluh BPP dengan pegawai tanaman pangan dalam menentukan calon petani dan calon lokasi (CPCL) pelaksana pengembang padi salibu.

## V. Sikap atau Kecenderungan Agen Pelaksana (Disposisi)

Variabel disposisi atau sikap agen pelaksana ini merupakan suatu variabel yang paling banyak dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga menyebabkan disposisi implementor atau kecenderungan implementor ini juga dapat menjadi penentu kinerja implementasi kebijakan. Disposisi agen pelaksana ini mencakup 3 hal, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, kognisi (pemahaman) agen pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan, dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

### a) Respon Implementor Terhadap Kebijakan

Hal penting yang perlu diperhatikan ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan adalah bagaimana respon yang ditunjukkan oleh para implementor atau aktor pelaksana. Sikap penerimaan ataupun penolakan dari aktor pelaksana akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja suatu implementasi kebijakan publik.

Respon Dinas Pertanian terhadap pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu ini baik dan kedepannya kegiatan pengembangan teknologi padi salibu ini akan terus dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar mengingat keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan program kegiatan ini seperti dapat meningkatkan indeks pertanian tanpa perlu menambah areal dengan cetak sawah baru dan memberikan banyak keuntungan bagi para petani.

Respon penyuluh yang ada di BPP kecamatan sebagai pelaksana kegiatan

dilapangan juga menunjukkan sikap penerimaan terhadap keberlanjutan pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar. mereka mengatakan selama dinas masih menganggarkan dana untuk pelaksanaan kegiatan ini maka mereka akan tetap membantu mendorong petani untuk mau melaksanakan teknologi salibu ini karena itu sudah merupakan tanggung jawab mereka sebagai penyuluh dinas.

### b) Kognisi

Kognisi atau juga disebut sebagai pemahaman dari implementor merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan publik. Jika ingin melihat efektif atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan publik, dapat dilihat dari tingkat pemahaman yang dimiliki oleh seluruh implementor atau aktor pelaksana yang terlibat. Jika tingkat pemahaman implementor terhadap kebijakan yang dilakukan rendah maka akan menyebabkan sulitnya proses implementasi kebijakan terkait dan begitu pula sebaliknya.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa penyuluh yang merupakan aktor pelaksana kegiatan di lapangan rata-rata mereka telah paham dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Para penyuluh telah memahami tata cara pelaksanaan teknologi padi salibu karena sebelumnya para penyuluh ini telah mendapatkan pelatihan ditingkat kabupaten berupa *training*. Begitu pun dengan pegawai pengelola yang ada di Dinas Pertanian mereka telah memahami tugas mereka sesuai dengan tupoksi masing-masing.

### c) Intensitas Disposisi Implementor

Intensitas disposisi implementor merupakan preferensi nilai atau kecenderungan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Preferensi nilai atau kecenderungan pelaksana ini memiliki kaitan terhadap keyakinan ataupun kepercayaan dari implementor terhadap sesuatu yang diterimanya dari kebijakan atau program tersebut. Jika implementor memiliki preferensi negatif terhadap kebijakan maka mereka cenderung tidak

akan mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program

Terkait penelitian ini Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar sebagai implementor program merasa yakin bahwa Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini sudah tepat dan mampu menjawab permasalahan perlunya peningkatan indeks panen untuk menciptakan ketahanan pangan tanpa perlu melakukan cetak sawah baru karena tidak memungkinkan melakukan cetak sawah baru lagi di Kabupaten Tanah Datar ini. Tetapi dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

## **VI. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kondisi lingkungan juga ikut mempengaruhi kinerja dari kebijakan publik. Ketika proses pelaksanaan suatu program kebijakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menilai kinerja yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan menyebabkan kegagalan kinerja implementasi kebijakan itu sendiri begitu juga sebaliknya.

### **a) Kondisi Sosial**

Kondisi sosial termasuk salah satu indikator variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kondisi sosial menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengoptimalan pengimplementasian program pengembangan teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar.

Salah satu faktor penyebab masih minim dan tidak meratanya pelaksanaan teknologi budidaya daya padi salibu di Kabupaten Tanah Datar salah satunya disebabkan sulitnya merubah kebiasaan petani yang terkait pelaksanaan tanam padi menggunakan cara tanam pindah dan banyak petani yang merasa repot dalam pelaksanaan salibu ini. Para petani di Kabupaten Tanah Datar sudah

terbiasa ketika memasuki musim tanam mereka melaksanakan cara tanam pindah atau penanaman benih padi baru di areal sawah yang sudah di bajak terlebih dahulu.

Hal terkait kebiasaan ini juga terjadi di Kecamatan Tanjung Emas yang merupakan kecamatan dengan pelaksanaan salibu paling sedikit di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dikarenakan adanya sebuah kebiasaan yang sudah terlaksana sejak lama yang mana kebiasaan ini disebut *bakauh* oleh orang-orang setempat.

Dapat dilihat bahwa kondisi sosial masyarakat berupa sebuah kebiasaan mempengaruhi pelaksanaan program. Sulitnya merubah kebiasaan petani dari pelaksanaan penanaman dengan cara tanam pindah berubah menggunakan teknik salibu menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu di Kecamatan Tanjung Emas masyarakatnya juga memiliki sebuah kebiasaan yang disebut *bakauh* atau penyusunan plakat sawah dengan tujuan untuk menyamakan penanaman padi oleh petani sehingga menghambat pelaksanaan program ini karena banyak petani yang enggan untuk mencoba melaksanakan penanaman padi dengan teknik salibu.

### **b) Kondisi Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar juga menjadi salah satu faktor mengapa belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar.

Tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar berpengaruh terhadap Implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar. Terutama pada Tahun 2020 dimana terjadi penyebaran wabah virus corona yang berdampak melemahnya seluruh sektor kehidupan. Akibat penyebaran virus corona ini juga berdampak kepada pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dipotong dan dialokasikan untuk

hal-hal yang lebih diutamakan saat itu.

Hal ini dapat dilihat dari pengurangan jumlah kuota kelompok tani penerima bantuan pupuk dan pelaksanaan sekolah lapang (SL) salibu yang hanya 7 kelompok tani saja, padahal banyak petani yang mengusulkan untuk mendapatkan SL salibu ini. Selain dukungan finansial dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar, kondisi ekonomi masyarakat terutama petani sebagai kelompok sasaran juga ikut mempengaruhi pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini. Ketidakmampuan petani untuk memiliki lahan sawah dan hanya mampu menjadi petani penggarap untuk lahan sawah orang lain menjadi alasan kurang optimalnya pelaksanaan program ini. Petani penggarap takut jika mereka melaksanakan salibu dilahan sawah milik orang lain, jika terjadi kegagalan mereka tidak mampu untuk menanggung kerugian tersebut.

### c) Kondisi Politik

Pelaksanaan sebuah kebijakan juga membutuhkan dukungan dari elit politik agar kebijakan yang diimplementasikan dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar membutuhkan dukungan elit politik agar dapat terlaksana dengan baik.

Dalam rangka mendukung Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu, Bupati Tanah Datar Periode 2021-2024 mengeluarkan beberapa program unggulan di bidang pertanian diantaranya adalah program peningkatan kuota pupuk bersubsidi serta program perbaikan irigasi. Melalui dua progul ini pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar dapat ditingkatkan untuk kedepannya.

### KINERJA KEBIJAKAN

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tingkat ketercapaian atas standar dan sasaran sebuah kebijakan, sehingga pada akhirnya tujuan dan standar akan tetap menjadi indikator paling penting dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dikarenakan dapat mempengaruhi

kinerja implementasi.

Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar khususnya bidang tanaman pangan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar diukur dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri atas 6 (enam) variabel yang saling berkaitan satu sama lainnya serta setiap variabel ini saling mempengaruhi terhadap keberhasilan pengimplementasian sebuah kebijakan. Enam variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, sikap atau kecenderungan agen pelaksana, karakteristik agen pelaksana serta terakhir ada kondisi sosial, ekonomi dan politik dan setiap variabel ini menurut Van Meter dan Van Horn memiliki keterkaitan satu sama lain.

Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini dalam pelaksanaannya merujuk kepada surat keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. SK kadis ini berisikan keputusan penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) pelaksanaan kegiatan sekolah lapang (SL) salibu bagi para petani pelaksana teknologi padi salibu. Dalam SK ini juga ditetapkan berapa luas lahan untuk pelaksanaan salibu ini. Dalam SK ini juga telah dicantumkan tujuan dari dilaksanakan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan melalui peningkatan produksi per Masa Tanam (MT) dan peningkatan Indeks Panen (IP) per tahun. Namun, sangat disayangkan untuk dasar hukum berupa peraturan bupati Tanah Datar yang mengatur pelaksanaan kegiatan ini belum ada sampai saat ini. Hal ini juga dibenarkan secara langsung oleh Kepala Dinas Pertanian bahwa sampai saat sekarang perbup khusus yang membahas kegiatan ini belum ada dan ini menjadi suatu catatan masukan bagi dinas. Dengan belum adanya peraturan bupati ini tentu menjadi salah satu alasan yang menjadikan pelaksanaan program ini belum maksimal terlaksana.

Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki dua indikator yaitu jelas dan terukur serta keadilan. Untuk mengukur indikator jelas dan terukur ini dilihat dari seberapa paham aktor pelaksana terkait program yang dijalankan. Pada penelitian ini terkait pemahaman implementor terkait program ini sudah baik, setiap pelaksana sudah paham dengan tupoksi kerja mereka masing-masing serta mereka memiliki satu pandangan terkait tujuan dari adanya program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini. Selanjutnya adalah indikator keadilan, indikator keadilan ini mengindikasikan bahwa seluruh yang terlibat dalam implementor suatu kebijakan baik itu implementor maupun kelompok sasaran harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Namun dalam penelitian ini, penyuluh sebagai aktor pelaksana dalam program ini merasa kurang adil terkait tunjangan uang minyak atau uang jalan yang mereka dapatkan ketika melaksanakan SL salibu. Hal ini dikarenakan jumlah uang minyak atau uang jalan ini sama besarnya diberikan oleh dinas kepada setiap penyuluh, sedangkan ada beberapa penyuluh yang memegang dua wilayah kerja tetapi besaran uang minyak yang mereka terima sama besarnya dengan penyuluh yang mengampuh satu wilayah kerja. Namun, untuk keadilan bagi kelompok sasaran itu sudah baik.

Indikator ukuran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan suatu program juga akan berpengaruh kepada sikap atau kecenderungan agen pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian. Hal ini dikarenakan jelasnya tujuan dari adanya Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu, membuat agen pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan BPP kecamatan menerima program pengembangan teknologi padi salibu ini untuk diterapkan dan memberikan respon positif terhadap keberlanjutan pelaksanaan program ini. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan aktor pelaksana yang tetap mau untuk melaksanakan program ini kedepannya. Selain itu pemahaman atau kognisi dari para penyuluh serta pegawai bidang tanaman pangan sebagai penanggung

jawab program ini sudah baik dimana mereka paham dengan tugas serta yang menjadi tanggung jawab mereka. Pemahaman dan respon yang baik dari para penyuluh serta pegawai Dinas Pertanian diindikasikan timbul karena intensitas disposisi untuk menjelaskan tujuan dan ukuran serta sasaran dari pelaksanaan program ini.

Selain ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur, kecenderungan atau disposisi agen pelaksana juga dipengaruhi oleh sumber daya karena jika sumber daya sebuah kebijakan atau program terpenuhi maka akan dapat mempengaruhi respon dan pemahaman agen pelaksana. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia yang meliputi anggaran serta sarana dan prasarana pendukung. Untuk Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini dalam pelaksanaannya memiliki kendala dalam sumber daya manusia serta sumber daya non-manusia terutama sumber daya anggaran. Dalam pelaksanaan program ini dinas pertanian terutama penyuluh yang ada di BPP sebagai aktor pelaksana secara langsung itu masih kekurangan dalam segi jumlahnya. Pada penelitian ini menjelaskan kurangnya sumber daya manusia pelaksana yaitu pertama kurangnya sumber daya penyuluh yang ada di BPP Kecamatan Pariangan dan BPP Kecamatan Tanjung Emas. Untuk BPP Kecamatan Pariangan jumlah sumber daya manusia yang ada hanya berjumlah 5 (lima) orang sedangkan nagari binaan yang ada di Kecamatan Pariangan berjumlah 6 (enam) nagari. Sehingga ini menyebabkan adanya penyuluh yang mengampuh 2 (dua) nagari binaan. Selanjutnya BPP Kecamatan Tanjung Emas sumber daya manusia yang ada hanya berjumlah 4 (empat) penyuluh nagari. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan penambahan jumlah penyuluh nagari sebanyak 3 (tiga) orang lagi. Hal ini dikarenakan luas wilayah binaan di Kecamatan Tanjung Emas mencapai 1429 hektare. Kurangnya jumlah sumber daya manusia ini tentu akan berpengaruh kepada kurang maksimalnya kinerja para pelaksana

dalam mengimplementasikan program terkait.

Selanjutnya pada sumber daya non-manusia juga terdapat kendala yaitu masih kurangnya dukungan sumber daya finansial dalam implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu. Hal ini dapat dilihat pada Tahun 2020 kemaren terjadinya pengurangan anggaran untuk pelaksanaan program serta pelaksanaan program ini dilakukan mengikuti anggaran yang tersedia. Serta kuota pelaksanaan SL salibu yang semakin berkurang dari sebelum-sebelumnya. Padahal menurut Van Meter dan Van Horn pengaruh ketersediaan sumber daya ini memiliki pengaruh yang besar dalam berjalannya suatu kebijakan. Sumber daya mampu meningkatkan rasa kepatuhan dari para implementor, sumber daya juga mampu mengontrol berjalan atau tidaknya suatu program.

Untuk bisa mewujudkan sumber daya yang mencukupi yang akan berdampak pada kecenderungan atau disposisi agen pelaksana haruslah didukung oleh lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik ini sangat berpengaruh terhadap sumber daya. Untuk Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu, lingkungan sosial atau kondisi sosial kelompok sasaran menjadi salah satu kendala belum optimalnya implementasi program ini. Hal ini disebabkan sulitnya merubah pola kebiasaan yang sudah dilaksanakan sejak dulu yang dalam penelitian ini adalah kebiasaan menggunakan cara tanam pindah ketika memasuki musim tanam padi serta adanya tradisi yang berkembang di masyarakat yaitu kegiatan *bakauah* di Kecamatan Tanjung Emas sehingga menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya program ini. selain itu lingkungan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu. Kebanyakan petani yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah petani pengarap yaitu petani yang yang tidak memiliki lahan sawah pribadi. Jadi mereka hanya menjadi

pengolah sawah milik orang lain. Jadi mereka takut jika mereka melaksanakan salibu di lahan sawah yang bukan miliki mereka, jika nanti terjadi kegagalan mereka sulit untuk mengganti rugi kegagalan sawah tersebut. Namun, berbeda halnya dengan lingkungan sosial, ekonomi yang kurang mendukung untuk pelaksanaan salibu ini lingkungan politik cukup mendukung dalam pelaksanaan program ini.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pengembangan teknologi padi salibu, Bupati Tanah Datar periode 2021-2024 mengeluarkan beberapa program unggulan di bidang pertanian diantaranya ada program peningkatan pupuk bersubsidi dan program perbaikan irigasi. Kedua program ini selaras untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu dikarenakan dengan adanya program peningkatan pupuk bersubsidi ini akan berdampak pada peningkatan bantuan pupuk bagi para petani pelaksana salibu. Sedangkan program perbaikan irigasi ini akan menjadi salah satu solusi terkait daerah yang ingin melaksanakan salibu tapi terkendala irigasi yang tidak lancar. Dengan adanya dukungan elit politik ini dapat berdampak kepada peningkatan semangat petani untuk mau melaksanakan pengembangan teknologi padi salibu sehingga juga akan berdampak kepada peningkatan ekonomi petani karena banyak manfaat dan keuntungan yang didapatkan oleh petani ketika mereka menerapkan teknik salibu ini seperti yang telah dijelaskan di atas.

Untuk karakteristik dari Dinas Pertanian sendiri sebagai pelaksana program pengembangan teknologi padi salibu untuk struktur organisasinya sendiri tidaklah berbelit karena yang terlibat dalam pelaksanaannya hanya salah satu bidang yang ada di dinas pertanian yaitu bidang tanaman pangan yang berkoordinasi dengan bidang penyuluhan. Sedangkan untuk norma atau aturan yang berlaku itu mengacu kepada aturan umum ASN dan tidak ada aturan khusus dalam pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu. Dengan karakteristik dari Dinas Pertanian

yang merupakan pelaksana independen, membuat pola komunikasi dan koordinasi menjadi lebih fleksibel.

Berdasarkan uraian terkait hubungan dari masing-masing variabel teori Van Meter dan Van Horn yang telah dijelaskan di atas dalam mengukur kinerja implementasi program, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Dinas Pertanian dalam menjalankan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu sudah berjalan cukup baik, walaupun untuk kedepannya diperlukan perbaikan agar program pengembangan teknologi padi salibu dapat berjalan dengan optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan serta analisis yang peneliti dapatkan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya beberapa permasalahan dilapangan ketika pelaksanaan program tersebut. Kendala pertama disebabkan oleh faktor sumber daya. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini untuk jumlah sumber daya pelaksanaannya masih kurang. Terutama sumber daya manusia yang ada di balai penyuluh pertanian (BPP) sebagai pelaksana langsung dilapangan itu masih kurang. Untuk jumlah sumber daya penyuluh yang ada di BPP Kecamatan Pariangan berjumlah 5 (lima) orang penyuluh nagari, sedangkan jumlah nagari di Kecamatan Pariangan ada 6 (enam) nagari. Sehingga hal ini menyebabkan adanya penyuluh yang memegang 2 nagari binaan. Sedangkan untuk BPP Kecamatan Tanjung Emas penyuluh nagarinya berjumlah 4 (empat) orang dan butuh 3 (tiga) orang penyuluh lagi mengingat luas wilayah di Kecamatan Tanjung Emas.

Selanjutnya indikator sumber daya non-manusia juga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pengimplementasian Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar. Masih

kurangnya dukungan sumber daya finansial dalam implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu. Kendala lainnya juga dapat dilihat pada variabel karakteristik agen pelaksana, dimana berdasarkan hasil pengamatan peneliti ada beberapa pegawai yang masih belum disiplin, seperti ada yang keluar membeli makan ketika jam kerja, terlambat datang kerja.

Terakhir pada indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik juga masih ditemukannya kendala. Pada kondisi sosial ditemukan kendala seperti masih sulitnya merubah kebiasaan serta tradisi masyarakat petani yang dapat menghambat pengimplementasian program. Kebiasaan ini berupa petani tersebut terbiasa ketika memasuki musim tanam padi, mereka cenderung melakukan tanam pindah dibandingkan menggunakan teknik salibu. Sedangkan untuk tradisi ini terdapat pada Kecamatan Tanjung Emas yang disebut dengan *bakauah* atau kegiatan menyusun plakat sawah yang menyebabkan petani di Kecamatan Tanjung Emas itu melakukan tanam serta panen serentak. Hal ini menyebabkan sulitnya penerapan teknologi padi salibu di Kecamatan Tanjung Emas ini. Pada kondisi ekonomi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini. Disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program ini pada Tahun 2020 yang lalu menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan implementasi program budidaya padi salibu serta kondisi perekonomian masyarakat petani juga menjadi salah satu alasan sulitnya mengimplementasikan program budidaya padi salibu ini.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah peneliti jabarkan di atas terkait Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran agar untuk kedepannya pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar dapat berjalan lebih baik, berikut ini beberapa

saran tersebut :

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk kedepannya diharapkan agar dapat mengeluarkan Peraturan Bupati terkait Pertanian khususnya landasan hukum untuk Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar agar kegiatan ini memiliki acuan yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan segera merealisasikan dan mewujudkan program perbaikan irigasi yang mana hal ini akan berdampak kepada peningkatan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini. karena jika irigasi sudah baik maka tidak ada alasan lagi untuk petani ragu melaksanakan salibu ini
3. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar diharapkan terus melakukan peningkatan karakteristik inovasi teknologi salibu yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani serta lebih menguntungkan.
4. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan diharapkan untuk lebih meningkatkan promosi kegiatan salibu, jangan karena ini program lama jadi sudah tidak memerlukan promosi lagi. Sebaiknya BPP tetap konsisten mempromosikan keunggulan dari teknik salibu ini serta menghimbaukannya kepada para petani

Petani diharapkan untuk tetap mencoba pelaksanaan salibu jika kondisi irigasi serta lahan mendukung untuk melaksanakan salibu karena banyak kemudahan serta keuntungan yang bisa didapatkan oleh petani jika mereka merawatnya dengan baik.

## REFERENCE

- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). *Bandung: Alfabeta.*
- Cahyani, Y. Y., Putera, R. E., & Ariany, R. (2021). Manajemen Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung. *Journal of Public Administration and Government*, 3(2), 78–94.
- Dinda, A. (2021). *Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kota Padang Panjang*. Universitas Andalas.
- Lipi. (2023). *Menjaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. <http://lipi.go.id/siaranpress/menjaga-ketahanan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19/22197>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Pujarama, W., & Yustisia, I. R. (2020). *Aplikasi Metode Analisis Resepsi untuk Penelitian Gender dan Media: untuk Peneliti Pemula dan Mahasiswa S-1*. Universitas Brawijaya Press.
- Putera, R. E. (2010). Formulasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Era Otonomi Daerah di Kabupaten Solok. *Jurnal Demokrasi*, 9(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edisi 2). Alfabeta.
- Sumatera Barat, B. (2021). *Luas Panen dan Produksi Padi Provinsi Sumatera Barat 2020 ( Hasil Kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Meode Kerangka Sampel Area)*. <https://sumbar.bps.go.id/publication/2021/12/20/599547622ffdf7e43058149f1uas-panen-dan-produksi-padi-provinsi-sumatera-barat-2020-hasil-kegiatan-pendataan-statistik-pertanian-tanaman-pangan-terintegrasi-dengan-meode-kerangka-sampel-area-.html>